JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6274

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA CIMAHI

Dona Ahmad Muharam[1], Agustina Setiawan[2], Danny Permana[3]
[1,2,3.] Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan sekaligus optimalisasi penerimaan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pencapaian target retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Cimahi.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan tipe penelitian eksplanatori. Populasi penelitian terdiri atas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi serta masyarakat yang telah mengurus PBG pada tahun 2023 sebanyak 181 orang. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan teknik *stratified random sampling*, sehingga diperoleh 75 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, regresi linear sederhana, koefisien determinasi, dan uji t dengan bantuan SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian target retribusi PBG di Kota Cimahi. Dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelayanan dan optimalisasi penerimaan retribusi. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan implementasi kebijakan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyempurnaan prosedur pelayanan, serta optimalisasi koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Persetujuan Bangunan Gedung, retribusi daerah, pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract

The implementation of the Building Approval (Persetujuan Bangunan Gedung/PBG) policy plays a strategic role in improving the effectiveness of public service delivery and optimizing local government revenue through regional levies. This study aims to examine the effect of local

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6274

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

government policy implementation on the achievement of Building Approval (PBG) levy targets in Cimahi City, Indonesia.

A quantitative approach with an explanatory survey design was employed. The study population consisted of 181 respondents, including officials of the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) and citizens who applied for Building Approval (PBG) services in 2023. A sample of 75 respondents was determined using Slovin's formula through a stratified random sampling technique. Data were collected through questionnaires, observations, documentation, and literature review. The data were analyzed using descriptive statistics, simple linear regression, the coefficient of determination, and t-tests with the assistance of SPSS software.

The findings indicate that local government policy implementation has a positive and statistically significant effect on the achievement of Building Approval levy targets in Cimahi City. The dimensions of communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure contribute to improving service effectiveness and optimizing regional levy revenue. These findings suggest that strengthening policy implementation through enhanced human resource capacity, improved administrative procedures, and better inter-agency coordination is essential to maximizing local own-source revenue (PAD) generated from Building Approval levies.

Keywords: *policy implementation; Building Approval (PBG); regional levy; local government; local own-source revenue.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu indikator kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi PAD menjadi penting karena kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah, salah satunya berasal dari retribusi daerah.

Salah satu jenis retribusi daerah yang memiliki kontribusi terhadap PAD adalah retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Persetujuan Bangunan Gedung merupakan bentuk perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Kebijakan ini merupakan implementasi dari reformasi sistem perizinan bangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6274

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bertujuan meningkatkan kepastian hukum, mempercepat proses pelayanan perizinan, serta mendukung kemudahan berusaha melalui sistem pelayanan yang lebih transparan, efektif, dan berbasis digital.

Di Kota Cimahi, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui sistem pelayanan elektronik yang terintegrasi. Digitalisasi pelayanan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi, mempercepat penerbitan persetujuan bangunan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Namun demikian, implementasi kebijakan PBG dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis, belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur, rendahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah yang terlibat dalam proses penerbitan PBG, serta keterlambatan pembayaran retribusi oleh masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kualitas pelayanan publik sekaligus rendahnya pencapaian target penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang disusun, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya. Banyak kebijakan yang secara normatif telah dirancang dengan baik, namun belum mampu menghasilkan keluaran dan dampak yang diharapkan karena adanya berbagai hambatan dalam proses implementasi. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi kebijakan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dapat diterapkan secara efektif sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III sebagai landasan konseptual. Edward III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Komunikasi yang jelas dan konsisten diperlukan agar tujuan kebijakan dipahami oleh seluruh pelaksana maupun kelompok sasaran. Ketersediaan

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6274

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, informasi, maupun fasilitas pendukung, menjadi prasyarat utama agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Disposisi pelaksana mencerminkan komitmen, integritas, dan kemauan aparat dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, struktur birokrasi yang jelas melalui pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan prosedur operasional yang efektif akan menentukan kelancaran implementasi kebijakan.

Dalam konteks pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, keempat dimensi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian target retribusi daerah. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan kewajiban pembayaran retribusi PBG sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pemohon. Ketersediaan sumber daya yang memadai memungkinkan pelayanan berlangsung lebih cepat, akurat, dan berkualitas. Disposisi aparatur yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik akan mendorong terciptanya pelayanan yang responsif dan akuntabel. Selain itu, struktur birokrasi yang sederhana serta koordinasi yang baik antarinstansi akan mempercepat proses penerbitan PBG sehingga berdampak pada meningkatnya realisasi penerimaan retribusi. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Meskipun berbagai penelitian mengenai implementasi kebijakan telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus menganalisis pengaruh implementasi kebijakan terhadap pencapaian target retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada era pasca diberlakukannya kebijakan PBG masih relatif terbatas, khususnya pada pemerintah daerah tingkat kota. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pencapaian target retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Cimahi berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan PBG dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi bangunan gedung.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6274

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian eksplanatori melalui metode survei untuk menjelaskan pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pencapaian target retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Cimahi. Variabel independen penelitian adalah implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang diukur berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi mengacu pada teori Edward III. Variabel dependen adalah pencapaian target retribusi PBG yang diukur berdasarkan indikator pencapaian target organisasi menurut Siagian.

Populasi penelitian berjumlah 181 orang yang terdiri atas aparatur DPMPTSP Kota Cimahi dan masyarakat yang telah mengurus PBG pada tahun 2023. Sampel penelitian sebanyak 75 responden ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan teknik *stratified random sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas Pearson Product Moment dan uji reliabilitas *Cronbach's Alpha*. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial menggunakan analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi (R^2), dan uji t dengan bantuan perangkat lunak SPSS untuk menguji pengaruh implementasi kebijakan terhadap pencapaian target retribusi PBG.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian target retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Cimahi. Berdasarkan analisis deskriptif, variabel implementasi kebijakan memperoleh skor capaian sebesar 63,24%, sedangkan variabel pencapaian target retribusi PBG memperoleh skor sebesar 67,55%. Kedua nilai tersebut berada dalam kategori cukup, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur operasional yang berlaku, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal dalam mencapai target penerimaan retribusi. Kondisi ini

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6274

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan telah diterapkan, masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan yang diharapkan dengan hasil implementasi di lapangan.

Penerapan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan bagian dari reformasi sistem perizinan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kota Cimahi, pelayanan PBG telah dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan memanfaatkan sistem pelayanan berbasis elektronik sebagai bentuk transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Implementasi sistem tersebut pada dasarnya telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan perizinan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pelayanan digital belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan.

Beberapa kendala yang masih ditemukan antara lain keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang menangani pelayanan PBG, belum optimalnya koordinasi antara DPMPTSP dengan perangkat daerah teknis lainnya, masih adanya masyarakat yang belum memahami prosedur pengurusan PBG, serta keterlambatan pembayaran retribusi oleh pemohon. Berbagai kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya pencapaian target retribusi PBG yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan sistem pelayanan berbasis elektronik, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kapasitas aparatur, serta tingkat kepatuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)**.** Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana suatu kebijakan mampu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Komunikasi

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6274

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Dimensi komunikasi merupakan faktor fundamental dalam implementasi kebijakan karena menentukan sejauh mana tujuan, isi, dan prosedur kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran. Edward III menegaskan bahwa komunikasi yang efektif harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu transmisi informasi**,** kejelasan pesan**,** dan konsistensi informasi**.** Dalam konteks pelayanan PBG di Kota Cimahi, komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai prosedur pengajuan izin, tetapi juga mencakup sosialisasi mengenai perubahan kebijakan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), persyaratan teknis, mekanisme pelayanan elektronik, hingga kewajiban pembayaran retribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan maupun kewajiban administratif dalam pengurusan PBG. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya keterlambatan penyelesaian permohonan, ketidaklengkapan dokumen, serta rendahnya kepatuhan dalam pembayaran retribusi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan belum sepenuhnya mampu membangun pemahaman dan kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi komunikasi melalui sosialisasi yang lebih intensif, pemanfaatan media digital, penyediaan informasi yang mudah dipahami, serta peningkatan kualitas layanan konsultasi kepada masyarakat.

Sumber Daya (*Resources*)

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya yang dimiliki organisasi pelaksana. Menurut Edward III, sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana pendukung. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif meskipun regulasi telah dirumuskan dengan baik.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa DPMPTSP Kota Cimahi telah didukung oleh aparatur dengan tingkat pendidikan yang relatif baik, tim teknis lintas sektor, serta sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Akan tetapi, kapasitas sumber daya tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal jumlah tenaga teknis, kompetensi aparatur di bidang bangunan gedung, serta penguasaan teknologi informasi. Selain itu, meningkatnya jumlah permohonan PBG memerlukan dukungan fasilitas pelayanan dan sistem informasi yang semakin andal agar proses

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6274

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

pelayanan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat. Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya menjadi salah satu faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan retribusi daerah.

Disposisi Pelaksana (*Disposition*)

Disposisi atau sikap pelaksana mencerminkan komitmen, integritas, dan kesediaan aparatur dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Edward III menjelaskan bahwa kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila pelaksana tidak memiliki komitmen yang kuat atau tidak memahami tujuan kebijakan tersebut.

Pelayanan PBG di Kota Cimahi telah diarahkan untuk menerapkan prinsip pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian target retribusi yang masih berada pada kategori cukup mengindikasikan bahwa komitmen implementasi masih perlu diperkuat. Peningkatan profesionalisme aparatur, pemberian pelatihan secara berkelanjutan, penguatan budaya pelayanan prima, serta peningkatan motivasi kerja menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan. Aparatur yang memiliki orientasi pelayanan publik yang tinggi akan mampu memberikan pelayanan secara lebih responsif sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi merupakan dimensi yang berkaitan dengan pembagian tugas, mekanisme koordinasi, standar operasional prosedur (SOP), dan hubungan antarorganisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan meminimalkan tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks pelayanan PBG di Kota Cimahi, DPMPTSP telah memiliki struktur organisasi yang jelas serta didukung oleh tim teknis lintas perangkat daerah yang bertugas melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi teknis sebelum penerbitan PBG. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi masih memerlukan penguatan, terutama dalam proses verifikasi teknis dan sinkronisasi data pelayanan. Selain itu, penyederhanaan prosedur pelayanan serta evaluasi terhadap standar operasional prosedur secara

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6274

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

berkala perlu dilakukan agar pelayanan dapat berlangsung lebih efektif dan mampu mempercepat realisasi penerimaan retribusi PBG.

Analisis inferensial semakin memperkuat temuan penelitian ini. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,961 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara implementasi kebijakan dengan pencapaian target retribusi PBG. Selanjutnya, hasil uji t menghasilkan nilai t-hitung sebesar 29,654 dengan tingkat signifikansi 0,000 (<0,05), sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh implementasi kebijakan terhadap pencapaian target retribusi PBG dapat diterima. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,923 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mampu menjelaskan 92,3% variasi pencapaian target retribusi PBG, sedangkan 7,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kondisi ekonomi masyarakat, tingkat kepatuhan wajib retribusi, kualitas sistem pelayanan elektronik, efektivitas pengawasan, dan faktor lingkungan kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat teori George C. Edward III bahwa implementasi kebijakan merupakan determinan utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen aparatur pelaksana, dan struktur birokrasi yang adaptif terbukti menjadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Cimahi. Temuan ini juga memberikan implikasi praktis bahwa upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi PBG tidak cukup hanya dilakukan dengan penyempurnaan regulasi, tetapi harus diiringi dengan penguatan kapasitas implementasi kebijakan pada seluruh dimensi yang dikemukakan oleh Edward III. Dengan demikian, peningkatan kualitas implementasi kebijakan akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta memperkuat kemampuan fiskal Pemerintah Kota Cimahi dalam mendukung pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencapaian target retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Cimahi. Secara deskriptif, implementasi kebijakan maupun pencapaian

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6274

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

target retribusi masih berada pada kategori **cukup**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan, tetapi masih memerlukan penyempurnaan agar dapat mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi.

Berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan pencapaian target retribusi PBG dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, komitmen aparatur pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung koordinasi pelayanan. Hasil analisis statistik menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara implementasi kebijakan dan pencapaian target retribusi (R = 0,961), dengan kontribusi pengaruh sebesar **92,3%**, sehingga implementasi kebijakan menjadi faktor dominan dalam menentukan keberhasilan pencapaian target retribusi PBG di Kota Cimahi.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan retribusi PBG tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, tetapi harus diikuti dengan penguatan implementasi kebijakan melalui peningkatan kualitas komunikasi kepada masyarakat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan prosedur pelayanan, serta penguatan koordinasi antarinstansi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kontribusi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.

Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (4th ed.). Sage Publications.

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Principles and Processes* (4th ed.). Oxford University Press.

Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta*

https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6274

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Kota Cimahi. (2021). *Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi*. Cimahi: Pemerintah Kota Cimahi.

OECD. (2021). *Government at a Glance 2021*. Paris: OECD Publishing.

Pemerintah Kota Cimahi. (2024). *Kota Cimahi Dalam Angka 2024*. Cimahi: Badan Pusat Statistik Kota Cimahi.

Siagian, S. P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.

World Bank. (2023). *GovTech Maturity Index 2022: Advancing Digital Transformation in the Public Sector*. Washington, DC: World Bank.